

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Pada bagian ini dijabarkan teori yang mana berkaitan dan relevan dengan penelitian ini. Dimana penjabaran teori ini dimaksudkan untuk mempermudah pembaca dalam memahami substansi penelitian.

2.1.1 Rent Seeking theory

Dalam Bahasa Indonesia teori ini memiliki sebutan sebagai teori perburuan rente ekonomi. Pertama kali diperkenalkan oleh ahli ekonomi berkebangsaan Amerika yakni George Tullock pada tahun 1967 yang kemudian dipopulerkan oleh Anne Kruger pada tahun 1974. Teori perburuan rente ekonomi ini memiliki dasar konsep yang mirip dengan konsep rente menurut ekonomi itu sendiri yakni mendapatkan keuntungan melalui cara pemanfaatan kepemilikan suatu sumber daya tertentu. Dalam kaitannya dengan teori ini perusahaan berupaya untuk mendapatkan keuntungan atau profit lebih tanpa adanya peningkatan produktifitas. Hal ini bisa didapatkan dan dimanfaatkan oleh para *Rent Seeker* melalui cara *lobbying* kepada pihak pemerintah.

Dengan dilakukannya *lobbying* tersebut maka nantinya dapat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi (Kuncoro, 2009). Adanya suatu timbal balik atau balas budi antar pihak dengan hubungan yang baik merupakan suatu kunci yang dapat mempengaruhi bagaimana kebijakan perekonomian tersebut diputuskan (Krueger, 1974). Dimana kebijakan atau aturan-aturan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perusahaan, baik dengan cara membatasi *supply* atas suatu komoditas, meningkatkan regulasi suatu pasar, maupun kebijakan yang berhubungan langsung dengan perusahaan terkait seperti misalnya penambahan sumber daya. Pada nyatanya teori perburuan rente ini seakan seperti bentuk lain daripada konsep monopoli (Kuncoro, 2009). Dimana pada suatu komoditas hanya terdapat satu atau beberapa penjual dan *barriers* untuk memasuki pasar yang relatif tinggi. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa keuntungan dari kebijakan-

kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah hanya akan dapat dirasa oleh beberapa pihak yang memiliki keterkaitan atau koneksi dengan pemerintah saja. Semakin berpengaruh pemerintah dalam hal ekonomi maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya fenomena *rent seeking* ini. **Penelitian Sebelumnya**

Berikut ini merupakan rangkuman dari beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi dasar dari dilakukannya penelitian ini.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Stanfield and Tumarkin (2018), diteliti apakah kekuatan politik dari *nonfinancial stockholders* dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Mereka menggunakan sampel sebesar 329 perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Australia (Australian Securities Exchange). Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan yang terdaftar pada bursa efek atau anak perusahaan tersebut. Kondisi politik pada penelitian ini ialah kemenangan koalisi. Dalam penelitiannya ditemukan bahwa nilai perusahaan secara signifikan dapat dipengaruhi oleh koneksi politik para *stakeholders* selain dari pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan tersebut.

Lebih lanjut Wati, Primiana, Pirzada, and Sudarsono (2019) meneliti tentang keterkaitan antara koneksi politik, *blockholder ownership*, dan performa. Sampel yang diuji merupakan 66 perusahaan konglomerat yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia dimulai dari tahun 2006 hingga tahun 2014. Penelitian tersebut menggunakan metode analisis *General Least Square*. Kemudian dalam mengukur performa atau kinerja perusahaan tersebut menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan pasar dan pendekatan *profit-based*. Untuk mengukur kinerja perusahaan melalui pendekatan pasar atau *market-based approach* digunakan variabel Tobin's Q sedangkan dalam *profit-based approach* digunakan variabel *return on asset* (ROA). Hasil dari penelitian tersebut ditemukan bahwasanya kehadiran pemegang saham yang besar dapat memotivasi perusahaan untuk melakukan pemantauan kinerja manajemen yang lebih baik. Kemudian ditemukan bahwa keberadaan koneksi politik dalam *state and family-controlled firm* dapat meningkatkan nilai dari perusahaan tersebut. Dalam kaitannya dengan penelitian yang saat ini tengah dilakukan, penelitian yang dilakukan oleh kedua peneliti yakni Wati et al. (2019) dan Stanfield and Tumarkin

(2018) diatas memberikan wawasan serta gambaran bahwa koneksi politik memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Kemudian pada penelitian Wati et al. (2019) ditemukan pengaruh positif terjadi pada perusahaan konglomerat yang dalam penelitian tersebut dijelaskan memiliki koneksi politik. Kemudian dalam segi pengukuran nilai perusahaan, penelitian Wati et al. (2019) diatas memiliki kemiripan variabel dengan penelitian yang saat ini dilakukan. Salah satu pengukuran nilai perusahaan menggunakan pendekatan pasar yakni menggunakan variabel Tobin's Q.

Do, Lee, and Nguyen (2015) telah melakukan penelitian yang menguji pengaruh dari koneksi politik terhadap nilai perusahaan pada momen setelah penutupan atau selesainya eleksi gubernur *United States*. Penelitian tersebut menggunakan perusahaan yang berkoneksi dengan kandidat dalam pemilihan gubernur sebagai sampel. Metode analisis yang digunakan oleh peneliti ialah *Regression Discontinuity Design (RDD)*. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Do et al. (2015) ditemukan bahwa koneksi politik memiliki dampak positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Dampak positif tersebut dirasakan oleh perusahaan yang memiliki koneksi atau hubungan dengan para kandidat pemilihan gubernur. Perusahaan dengan koneksi politik tersebut mengalami kenaikan nilai perusahaan sebesar 3,89%. Lebih lanjut ditemukan pula bahwa kenaikan dari nilai perusahaan tersebut lebih bernilai atau memiliki *value* tersendiri bagi, perusahaan yang memiliki koneksi politik dengan kandidat terpilih atau pemenang, negara atau negara bagian dengan tingkat praktik korupsi tinggi, serta perusahaan yang berdiri pada domisili atau daerah kekuasaan kandidat terpilih. Kemudian setelah masa eleksi usai ditemukan juga bahwa perusahaan yang memiliki hubungan dengan kandidat terpilih relative menerima kontrak pengadaan yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki hubungan dengan kandidat yang kalah atau tidak terpilih. Dalam kaitannya dengan penelitian yang saat ini sedang dilakukan, penelitian yang dilakukan oleh Do et al. (2015) ini memberikan gambaran bahwa koneksi politik memiliki hubungan terhadap nilai perusahaan. Selain itu diketahui pula bahwa koneksi

politik memiliki hubungan positif yang signifikan terhadap nilai dari perusahaan yang memiliki koneksi politik tersebut.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Tian, Xu, and Zhang (2019), mereka meneliti tentang bagaimana dampak dari kebijakan pemerintah yang mengatur tentang polusi lingkungan terhadap nilai perusahaan dengan polusi yang besar. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 270 perusahaan *heavy-polluted* yang terdaftar di bursa efek dan menggunakan *multivariate regression* untuk menguji kaitannya dengan koneksi politik. Hasil yang ditemukan mengindikasikan bahwa kebijakan tersebut memiliki pengaruh negative terhadap nilai perusahaan *heavy-polluted firm*. Akan tetapi bagi perusahaan yang memiliki koneksi politik, mereka mengalami penurunan nilai perusahaan yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan sejenis tanpa koneksi politik. Penelitian lebih lanjut menemukan bahwa koneksi politik pada tingkat pemerintahan pusat lebih memiliki pengaruh dibandingkan dengan koneksi politik pada tingkat daerah. Penelitian tersebut terdapat kemiripan dengan penelitian yang dilakukan saat ini yaitu menggunakan metode *multivariate regression* dalam menguji koneksi politik.

Dalam penelitiannya, C. R. Chen, Li, Luo, and Zhang (2017) meneliti tentang bagaimana koneksi politik dalam perusahaan yang terdaftar dalam bursa efek di china (Shanghai Stock Exchange dan Shenzhen Stock Exchange) berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Penelitian dilakukan dengan sampel sebesar 6.350 observasi *firm-year* dalam periode rentang tahun 2004 hingga 2009. *Firm value* (nilai perusahaan) dalam penelitian ini diukur menggunakan variabel Tobins'Q dan menggunakan metode analisis *multivariate regression* untuk menganalisis variabel koneksi politik. Dimana Variabel yang digunakan untuk mengukur nilai perusahaan serta metode analisis koneksi politik sama dengan yang digunakan dalam penelitian saat ini. Penelitian yang dilakukan oleh C. R. Chen et al. (2017) menemukan bahwa koneksi politik memiliki pengaruh negative pada keseluruhan sampel. Akan tetapi setelah dipisahkan antara Perusahaan Milik Pemerintah (SOE) dan Perusahaan Swasta (Non-SOE) ditemukan bahwa pengaruh negative koneksi politik terjadi pada perusahaan milik pemerintah,

sedangkan pada perusahaan swasta koneksi politik justru dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Y. Chen et al. (2020) melakukan sebuah penelitian tentang bagaimana koneksi politik berpengaruh terhadap nilai suatu perusahaan dalam kaitannya dengan kebijakan pemerintah china yang memerintahkan para director independen yang berhubungan atau seorang politisi untuk *resign* dari jabatannya. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan selain perusahaan keuangan yang terdaftar di bursa efek, menggunakan Tobin's Q sebagai variabel pengukur nilai perusahaan serta koneksi politik sebagai dummy variabel. Dari analisis yang telah dilakukan dengan metode regresi mengadaptasi model DID menemukan bahwa dengan adanya kebijakan tersebut maka perusahaan kehilangan koneksi politik yang menyebabkan penurunan nilai perusahaan secara signifikan. Penurunan nilai perusahaan tersebut tidak terlalu signifikan dirasakan oleh *State Owned Enterprise*, justru perusahaan swasta yang merasakan dampak dari adanya kebijakan tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa koneksi politik memiliki peran dalam peningkatan nilai perusahaan pada perusahaan swasta di China sehingga saat hilangnya koneksi politik nilai perusahaan tersebut menurun secara signifikan.

Temuan itu selaras dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Liu et al. (2018). Penelitian itu dilakukan terhadap seluruh perusahaan yang terdaftar di bursa efek china atau dalam kasus ini Shenzhen dan Shanghai Stock Exchange. Berdasarkan penelitiannya ditemukan bahwa koneksi politik memang memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan, akan tetapi juga terdapat resiko politik jika terjadi kebijakan seperti *the 18th decree* ini. Dimana direktur independen yang berkoneksi politik atau merupakan politisi diharuskan untuk mundur dari jabatannya. Hilangnya koneksi politik ini menyebabkan nilai perusahaan yang sebelumnya memiliki koneksi politik menjadi turun. Kedua penelitian diatas memiliki kesamaan dalam hal topik dengan penelitian yang saat ini dilakukan yakni menguji pengaruhnya koneksi politik terhadap nilai perusahaan, namun terkait pemilihan sampel terdapat perbedaan yaitu dalam kedua penelitian tersebut meneliti seluruh perusahaan yang terdaftar di bursa efek sedangkan pada

penelitian yang saat ini dilakukan lebih berfokus pada satu sektor perusahaan yakni perusahaan sektor pertambangan.

2.3 Pengembangan Hipotesis

Didasarkan pada teori serta penelitian yang terdahulu dimana kedua tersebut menjadi dasar dari penelitian ini, akan dijelaskan pengaruh dari koneksi politik atau *political connection* terhadap variabel nilai perusahaan yang pada penelitian ini diukur menggunakan pengukuran Tobin's Q. Dalam sebuah pemerintahan suatu negara para politisi memiliki peran serta dan andil dalam menentukan tingkat keterlindungan investor eksternal yang mana dengan hal ini dapat memberikan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi kepada pihak internal perusahaan (yang juga sebagai investor perusahaan tersebut) dalam hal ini manajer ataupun pemegang saham yang memiliki hak atas pemberian keputusan (Bebchuk & Neeman, 2005). Di sisi lain jajaran direksi perusahaan yang merupakan politisi ataupun memiliki koneksi politik dapat memiliki kontrol terhadap berbagai keputusan perusahaan untuk kemudian dimanfaatkan demi kepentingan pribadi, perusahaan, maupun golongan politik.

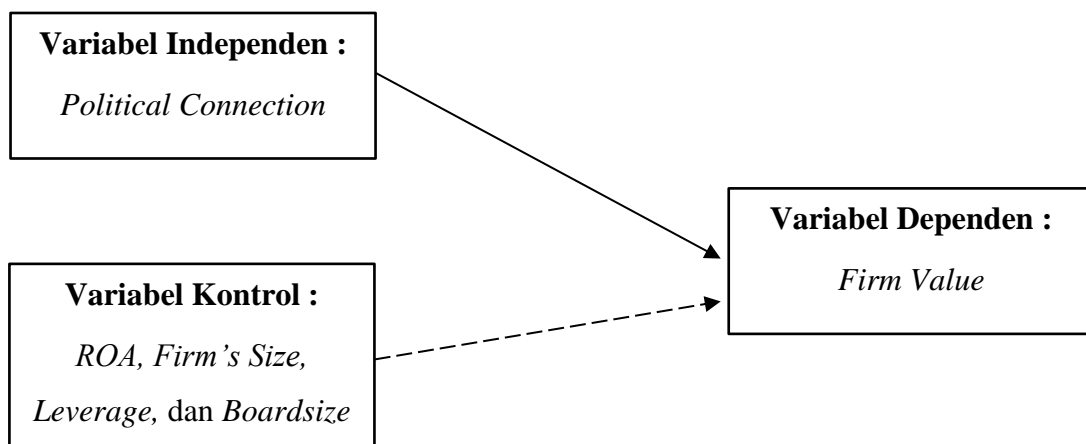
Dalam konsep teori *rent seeking* atau perburuan rente perusahaan akan melakukan Langkah *lobbying* kepada pihak pemerintah dengan harapan dapat mendapatkan keuntungan dengan mempengaruhi kebijakan kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintah sehingga dapat meningkatkan mutu kinerja perusahaan. Manfaat akan Hal ini dapat lebih dirasakan pada negara yang masih kental serta erat kaitannya dengan praktik korupsi. Negara Indonesia dalam hal ini menurut data yang diperoleh dari *Transparency International 2019* merupakan negara dengan peringkat nomor 85 dari 180 negara dalam hal transparansi. Pada *Corruption Perception Index* tahun 2019, Indonesia mendapatkan nilai 40 dari 100 yang berarti pemerintahan di Indonesia masih belum cukup transparan dan kental dengan kaitannya praktik korupsi. Perusahaan akan mengalami peningkatan nilai perusahaan ketika eksekutif dari perusahaan tersebut terjun ke dalam dunia politik (M. Faccio, 2006). Temuan tersebut selaras dengan penelitian Wang et al. (2018) bahwasanya menjaga hubungan politik yang baik dapat berfungsi sebagai perlindungan nilai perusahaan ketika terjadinya sebuah *political*

shock. Hal ini selaras pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Tian et al. (2019), bahwa adanya koneksi politik dapat memitigasi penurunan nilai perusahaan yang disebabkan oleh adanya aturan atau kebijakan baru oleh pemerintah. Penelitian ini mengambil sampel dari perusahaan sektor pertambangan yang terdapat di Indonesia sehingga kemungkinan besar akan di dapatkan pengaruh atas koneksi politik terhadap nilai dari perusahaan tersebut. Maka dengan dasar penjelasan diatas dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Koneksi politik berpengaruh positif terhadap Nilai perusahaan pertambangan di Indonesia.

2.4 Kerangka Konseptual

Penelitian ini menganalisa pengaruh dari dimilikinya koneksi politik terhadap nilai perusahaan (*firm value*). Dalam melakukan pengujian pengaruh koneksi politik terhadap nilai perusahaan digunakan beberapa variabel kontrol seperti *Return on Asset*, *Size*, *Leverage* juga *Boardsize*. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut.



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual